



PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA PEMERINTAH

(Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang)

Dea Rahma Novitasari, Tri Jatmiko Wahyu Prabowo¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone +622476486851

ABSTRACT

This study aims to obtain empirical evidence regarding the implementation of regional financial management supervision in the Semarang City Regional Work Unit (SKPD), both partially and simultaneously totaling 46 SKPD. The population in this study is the Semarang City Regional Performance Unit. Source of data used for the research is primary data which is quantitative research obtained from questionnaires and using the saturated technique. Analysis of the data in this study uses descriptive statistical analysis, classic assumption tests, and multiple linear regression. The result of the analysis of the study shows that internal control and regional financial management had a positive and significant effect on the performance of local governments.

Keywords: *Internal Oversight, Regional Financial Management, The Performance Of Local Government*

PENDAHULUAN

Di Indonesia untuk saat ini dalam sektor publik dapat menjadi sorotan umum yang dimana pemerintah dalam menjalankan suatu tugas dan kewajiban yang diberikan kepercayaan diberikan dari rakyat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang nantinya diharapkan pemerintah dapat memenuhi harapan dari masyarakat dalam menjalankan kinerja pelayanan publik dengan baik dengan adanya suatu pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal yang ada dalam pemerintah.

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan seluruh kegiatan yang dilakukan dalam pemerintahan untuk dapat sesuai dengan indikator yang ada seperti akuntabilitas, value for money, kejujuran, transparansi, dan pengendalian. serta nantinya dapat dimonitor dan diawasi oleh masyarakat untuk menghindari dan mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat terjadi sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat dikatakan faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja dalam pemerintah

Berdasarkan pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pedoman dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dapat meliputi kekuasaan yang dapat merupakan keseluruhan dari kegiatan diantaranya terdapat suatu perencanaan, suatu pelaksanaan, suatu pengawasan, suatu penatausahaan, suatu pelaporan dan suatu untuk pertanggungjawaban yang akan dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah yaitu Pengawasan Internal. Pengawasan Internal merupakan suatu bentuk dari kegiatan pengawasan yang dilakukan berfungsi untuk dapat mengantisipasi, memonitor, dan menghindari kesalahan tugas-tugas organisasi agar sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditentukan serta didukung dengan beberapa indikator untuk melakukan pengawasan internal. sehingga hal ini harus mendapat

¹ Corresponding author

perhatian secara khusus dalam setiap kegiatan agar dapat terwujud atau setidaknya dapat mendekati suatu bentuk tujuan yang diinginkan

Pengawasan Internal dapat dijalankan untuk 1) meningkatkan suatu kinerja dalam suatu aparatur pemerintah dan dapat menciptakan suatu aparatur agar dapat jujur, bersih, bertanggungjawab, dan profesional (2) dapat memberantas adanya penyalahgunaan kewenangan dan terdapat kemungkinan adanya praktek KKN (3) dapat memberikan penegakan mengenai suatu peraturan yang dapat diberlakukan, dan (4) menjamin mengenai keuangan negara. Sehingga pengawasan internal dapat dikatakan baik apabila dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan harapan dan kepercayaan dari masyarakat dengan adanya pengawasan yang melekat maka suatu kegiatan akan lebih terkontrol dan dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya penyimpangan yang ada, dengan demikian pengawasan akan dapat meningkatkan kinerja pemerintah itu sendiri.

Kinerja dapat diartikan untuk sebagai bentuk dalam menggambarkan tentang adanya tingkat dalam pencapaian dari adanya suatu sistem pelaksanaan mengenai proses/ program/ kebijakan/ rencana/ kegiatan untuk dapat mencapai suatu tujuan, visi dan misi serta sasaran dalam organisasi tertuang dalam bentuk rumusan yang terdapat dalam skema strategis dari suatu organisasi. Selain itu, dapat juga dikatakan kinerja adalah pencapaian yang telah terwujud oleh suatu organisasi dalam rentang waktu tertentu.

Dalam memberikan suatu pelayanan publik dalam kinerja pemerintah dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator yang diperlukan untuk mengukur kinerja pemerintah yang telah dilakukan dengan meliputi indikator input, indikator proses, indikator output, indikator outcome, indikator benefit dan indikator impact. Sehingga nantinya dapat untuk menilai apakah kinerja pemerintah dapat memberikan pengaruh pada pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal yang ada dalam pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuzmalizar (2014) yang menggunakan beberapa indikator untuk mengukur kinerja pemerintah, yaitu indikator mengenai pengelolaan keuangan dan indikator mengenai pengawasan internal yang terdapat dalam pemerintah untuk dapat mempengaruhi kinerja pemerintah. Apabila dengan indikator tersebut dianggap ukuran yang dapat dijadikan untuk mengukur kinerja yang ada dalam pemerintah.

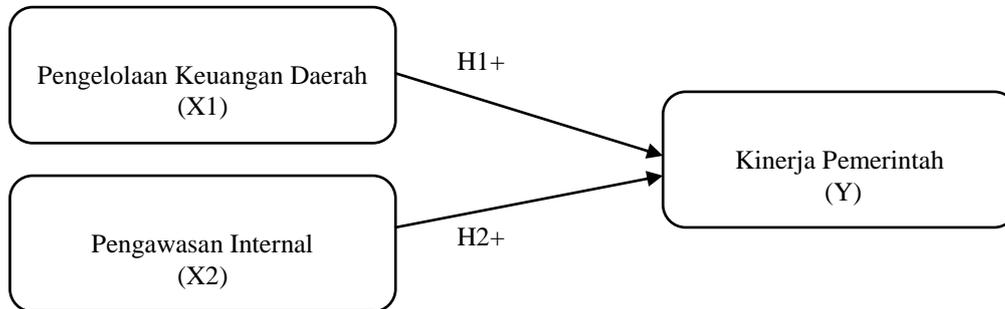
Penelitian yang dilakukan oleh Winda Novia Andiani, (2016) menggunakan pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal sebagai variabel independen. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah sebagai variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah, dan pengawasan internal juga berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal yang dimiliki dalam pemerintah terhadap kinerja pemerintah yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan keuangan daerah, pengawasan internal dan kinerja pemerintah. Variabel dependen pada penelitian ini adalah kinerja pemerintah, variabel independen pada penelitian ini adalah pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal. Dengan menggunakan instrumen pengukuran skala likert skor 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 5 (sangat setuju). Hubungan antar variabel dalam penelitian ini digambarkan dalam gambar 1.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu kegiatan dalam menyelenggarakan pemerintah yang dilakukan dengan berupa kebijakan, kesesuaian, standar, keterbukaan, transparansi, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang dijalankan serta nantinya dapat dimonitor dan diawasi oleh masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib dalam suatu pemerintah untuk memenuhi harapan masyarakat yang tergantung pada cara pengelolaan keuangannya. Apabila semakin paham pegawai dalam melakukan pengelolaan keuangan pada setiap satuan kerja maka akan menghasilkan kinerja pemerintah yang baik

Teori legitimasi mendukung pengelolaan keuangan daerah untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah. dalam hal ini pengelolaan keuangan merupakan suatu bentuk yang dilakukan pemerintah akan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat dikarenakan legitimasi masyarakat kepada pemerintah dapat menjadi faktor yang strategis bagi perkembangan pemerintahan ke depan. Dalam memperoleh legitimasi dari rakyat pengelolaan keuangan daerah tidak bisa dilepaskan dari monitor masyarakat, tempat dimana pemerintah menjalankan fungsinya. Sehingga nantinya pemerintah mampu menciptakan keseimbangan serta keadilan dalam masyarakat dan akan mengurangi kemungkinan berjalannya fungsi-fungsi negatif yang berdampak pada rasa tidak percaya dan timbulnya penyimpangan.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh penelitian Tuasikal (2006) dalam penelitiannya menyatakan bahwa bila pengelolaan keuangan daerah dapat dikelola berdasarkan aturan yang ditetapkan maka akan mendorong peningkatan kinerja satuan kerja perangkat daerah. Hal tersebut diyakini bahwa apabila dalam memberikan pelayanan publik yang baik maka dapat diasumsikan jika pengelolaan keuangan daerah yang baik akan mempunyai pengaruh terhadap kinerja yang baik untuk suatu instansi pemerintah.

H1 : Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah

Pengaruh Pengawasan Internal terhadap Kinerja Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, *review*, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik.. Sesuai dengan teori legitimasi, untuk dapat menyakini apabila jika seorang memiliki kinerja pemerintah yang baik maka akan dapat memberikan dampak hasil yang memuaskan dan dapat meningkatkan kualitas pekerjaan dari pekerja sehingga akan dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan internal yang ada dalam

pemerintahan. Maka dari itu, dapat memunculkan kepercayaan diri dari masyarakat terhadap pemerintah.

Pengawasan Internal mampu melakukan hasil pengawasan dengan runtut, efektif, efisien, dan optimal. Teori legitimasi mendukung pengawasan internal untuk mengetahui pengaruh pengawasan internal terhadap kinerja pemerintah yang menjelaskan bahwa apabila kinerja pemerintah telah memiliki kepercayaan dari masyarakat dalam melakukan pengawasan internal maka pemerintah telah berhasil menjalankan legitimasi tersebut

Hal ini didukung oleh penelitian Winda Novia (2016) Yang memberikan bukti bahwa pengawasan internal memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah secara signifikan, Semakin baik pengawasan intern yang dilaksanakan akan memberikan dampak semakin baik kinerja Pemerintah daerah yang dicapai. Penelitian yang telah dilakukan oleh Almanda Primadona (2013) yang menerangkan tentang adanya korelasi positif secara signifikan terhadap kinerja pemerintah. Hal tersebut di yakini bahwa jika seorang memiliki kinerja pemerintah yang baik maka akan dapat memberikan dampak hasil yang memuaskan dan dapat meningkatkan kualitas pekerjaan dari pekerja sehingga akan dapat dilakukan dan meningkatkan pengawasan internal yang ada dalam pemerintah.

H2 : Pengawasan Internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel dependen pada penelitian ini adalah kinerja pemerintah. Instrumen pengukuran menggunakan skala likert, skor 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 5 (sangat setuju). Dengan indikator :

1. Masukan
2. Proses
3. Keluaran
4. Hasil
5. Manfaat
6. Dampak

Variabel independen pada penelitian ini adalah pengawasan internal dan pengelolaan keuangan daerah. Instrumen pengukuran menggunakan skala likert, skor 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 5 (sangat setuju). Dengan indikator :

1. Lingkungan Pengendalian.
2. Penilaian Resiko
3. Aktivitas Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan

Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah bagian keuangan yang bekerja pada setiap Satuan kerja Perangkat Daerah di wilayah Semarang yang berjumlah 46 daftar SKPD dengan terdiri atas Dinas, Badan dan Kecamatan yang menggunakan teknik sensus pada penelitian ini, karena untuk dapat mengambil dibagian dari populasi yang secara representative (mewakili).

Metode Analisis

Uji hipotesis pada penelitian ini terdiri dari analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi atau R^2 , uji signifikan simultan atau uji statistik F, dan uji signifikansi parsial atau uji statistik t. Model regresi pada penelitian ini adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y : Kinerja Pemerintah Daerah

a : Konstanta

b_1 - b_2 : Koefisien regresi variabel independen

X_1 : Pengawasan Internal

X_2 : Pengelolaan Keuangan Daerah

e : Standar eror

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah Semarang yang berjumlah 46, dengan melakukan kuesioner. Berikut rincian penyebaran kuesioner pada SKPD di wilayah Semarang :

Tabel 1
Rincian Penyebaran Kuesioner

No.	SKPD	Jumlah
1.	Dinas	19
2.	Badan	11
3.	Kecamatan	16
	Total	46

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2019

Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui deskripsi mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini secara ringkas. Statistik deskriptif atas penelitian ini disajikan pada tabel 2.

Tabel 2
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maksimum	Rata-Rata	Deviasi Standar
Pengelolaan Keuangan Daerah	46	30	36	33,11	1,433
Pengawasan Internal	46	76	111	103,63	5,127
Kinerja Pemerintah	46	24	29	26,98	1,220

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 2, dapat disimpulkan bahwa variabel pengelolaan keuangan daerah, pengawasan internal dan kinerja pemerintah memiliki rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan nilai deviasi standarnya. Hal tersebut dapat diartikan bahwa variabel ini memiliki varian data yang rendah.

Interpretasi Hasil

Penelitian ini menggunakan dua perumusan hipotesis. Hipotesis pertama yaitu Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah. Hipotesis kedua yaitu Pengawasan Internal berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah. Berikut tabel mengenai interpretasi hasil :

Tabel 3
Interpretasi Hasil

	Hipotesis	Sig.	Kesimpulan
H1	Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah	0,006	Hipotesis diterima
H2	Pengawasan internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah	0,002	Hipotesis diterima

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2019

Hipotesis 1

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis pertama pada penelitian ini didukung, pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah. Pada penelitian ini diperoleh nilai koefisien regresi pengelolaan keuangan daerah sebesar 2,879 dan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,006 dimana nilai tersebut menunjukkan hasil bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Winda Novia Andian (2016) tentang pengaruh pengawasan internal pemerintah terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan bahwa pengawasan internal pemerintah dan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang sudah dilaksanakan oleh SKPD dan termasuk dalam kategori baik, selain itu penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan internal pemerintah berhubungan secara signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Abdul (2009) yang meneliti tentang pengaruh implementasi sistem akuntansi, pengelolaan keuangan daerah terhadap fungsi pengawasan dan kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, yang mana implementasi sistem pengelolaan keuangan telah mendorong peningkatan kinerja Pemerintah daerah, sebab proses pengelolaan keuangan menekankan pada hubungan antara dana yang dianggarkan dengan hasil yang ingin dicapai.

Dengan demikian pengelolaan keuangan daerah dalam pemerintah di Kota Semarang dapat berjalan dengan baik karena telah dapat meminimalisir pembengkakan pengeluaran yang tidak diinginkan, terbentuknya sistem penganggaran yang tidak rumit sehingga dapat diakses dan

menciptakan lingkungan kerja yang sehat sehingga dalam melakukan pengelolaan keuangan telah berjalan dengan baik.

Hipotesis 2

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis kedua pada penelitian ini didukung, pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah. Pada penelitian ini diperoleh nilai koefisien regresi pengawasan internal sebesar 2,879 dan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,006 dimana nilai tersebut menunjukkan hasil bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Winda Novia Andiani (2016) yang mengemukakan bahwa pengawasan internal merupakan alat yang paling efektif yang dibangun ke dalam infrastruktur organisasi dan menjadi bagian dari inti organisasi. pengawasan internal yang terpadu akan meningkatkan mutu dan insentif organisasi, menghindari biaya-biaya tidak perlu dan memungkinkan tanggapan yang cepat terhadap kondisi yang berubah – rubah. Selanjutnya penelitian menurut Lucfia Anisatul (2016) mengatakan bahwa pengawasan sesungguhnya mencakup aspek lingkup pengendalian dan pemeriksaan yang dilakukan pihak atasan terhadap bawahan. Jadi, pengawasan internal merupakan salah satu aspek yang mendukung untuk tercapainya kinerja aparatur pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yuzmalizar (2014) yang menyatakan bahwa pengawasan internal memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pengawasan internal yang dimiliki pemerintah baik, maka akan mampu menghasilkan kinerja pemerintah yang berkualitas.

Dengan demikian pengawasan internal dalam pemerintah daerah Kota Semarang akan lebih terarah dalam pencapaian sarasannya. Selain itu penyimpangan dan penyelewengan juga akan terminimalisir karena satuan kerja menggunakan prosedur yang merupakan bagian dari pengawasan sebagai salah satu dasar pelaksanaan kegiatan.

KESIMPULAN

Pengawasan internal berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja SKPD pemerintah daerah Kota Semarang. Apabila semakin baik pengawasan internal maka untuk kinerja pemerintah daerah akan dapat semakin baik, maka hasil pengawasan internal terhadap kinerja pemerintah daerah (H1) diterima. Hal tersebut mampu membuktikan bahwa pengawasam internal yang baik apabila terdapat control yang bagus, dapat memberikan kepercayaan terhadap masyarakat dan pengawasan dapat dijalanannya sesuai dengan indikator yang ada.

Pengelolaan Keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja SKPD pemerintah daerah Kota Semarang, maka akan dapat semakin baik pula kinerja dalam pemerintah daerah, dan hasil Pengelolaan Keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah (H2) diterima. Hal tersebut mampu membuktikan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik apabila dapat meminimalisir pembengkakan pengeluaran yang tidak diinginkan, terbentuknya sistem penganggaran yang tidak rumit sehingga dapat diakses dan dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu data yang diperoleh hanya dengan menyebarkan kuesioner kepada responden tanpa melakukan *interview* secara langsung, dan penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel dependen saja sehingga diharapkan dapat menambahkan varaibel dependen.

Saran yang diberikan peneliti atas keterbatasan tersebut yaitu menambah indikator guna mengukur variabel – variabel yang diteliti, menggunakan indikator yang telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya sehingga data yang diperoleh lebih valid dan reliabel, sehingga mampu memperkuat teori dan hasil penelitian yang diperoleh.

REFERENSI

- Abdul Rohman, 2009, Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal*.
- Almanda, Primadona. 2013. Pengaruh Pengawasan Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
- Askam Tuasikal. 2008. *Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah*. Vol.10. No 1. ISSN : 1410-8623
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Penerbit Erlangga : Jakarta
- Ghozali, Imam dan Anis Chariri. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: BPFE Universitas Diponegoro.
- Halim, 2015, *Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan*. Edisi Kelima. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Hidayat, Rahmad. 2015. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman). *Skripsi*, Universitas Negeri Padang.
- Lucfia Anisatul, 2017. Pengaruh Pengawasan Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar., *Jurnal*
- Made, Budi Sastra Wiguna, Gede Adi Yuniartha, Nyoman Ari Surya Darmawan. 2015. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Kabupaten Buleleng. *e-Journal.undiksha.ac.id*. Volume 3 No.1 Tahun 2015
- Mahmudi, 2015, *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Mulyadi, 2014, *Sistem Akuntansi*, Jakarta : Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 *Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*
- Sembiring, Uliana Ria, 2016, *Sistem Pengawasan Pemerintah Daerah*. Vol ,No. 1
- Suchman, Mark C. 1995. *Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches*. *The Academy of Management Review* Vol. 20 No. 3. pp. 571-610
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Winda Novia Andiani, 2016, tentang Pengaruh Pengawasan Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah, *Jurnal*.
- Yusmalizar, 2014. Pengaruh Pengawasan Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, *Artikel Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*